



Modul Pelatihan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dalam Kerangka Pemberdayaan Nelayan pada Masyarakat Nelayan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi

Penyusun:

Dr. Agustina M. Purnomo, SP., M.Si

Drs. Denny Hernawan, M.A

Drs. G. Goris Seran, M.Si.

Irma Purnamasari, S.Sos., M.Si

Berry Sastrawan, S.Sos., .A.P

Afmi Apriliani, S.Sos., M.A.P

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Djuanda Bogor

Desember, 2021

Modul Pelatihan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dalam Kerangka Pemberdayaan Nelayan pada Masyarakat Nelayan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi

ISBN : 978-602-6585-92-9

Penulis:

Agustina Multi Purnomo

Denny Hernawan

G. Goris Seran

Irma Purnamasari

Berry Sastrawan

Afmi Apriliani

Editor : Agustina M. Purnomo

Layouter : Fadlan Fauzan

Desain sampul : Fadlan Fauzan

Foto Sampul : Arif Miftakhul Aziz; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda

Tanggal terbit: 1 Maret 2022

Penerbit :

Unida Press

Kampus Universitas Djuanda Bogor

Jl. Tol Ciawi No.1 Bogor 16720

Kata Pengantar

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan ijin dan karunia-Nya modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dalam Kerangka Pemberdayaan Nelayan pada Masyarakat Nelayan Pelabuharatu Kabupaten Sukabumi ini dapat terselesaikan. Modul ini disusun sebagai penunjang pembelajaran pelatihan. Pelaksanaan pelatihan merupakan bagian dari program Pembelajaran Kolaboratif Berorientasi pada Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021.

Modul ini disusun mengacu pada hasil penelitian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan untuk Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim yang dilaksanakan di masyarakat nelayan Pelabuhanratu pada tahun 2018-2020. Modul pelatihan terdiri dari lima bagian, pendahuluan, materi pelatihan, pelaksanaan dan metode pelatihan, modul pembelajaran dan penutup. Penyusunan modul bertujuan untuk membuat pedoman pelaksanaan pelatihan agar sesuai dengan tujuan program Pembelajaran Kolaboratif Berorientasi pada Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Penyusunan modul mempertimbangkan kesinambungan antara tujuan pelatihan dengan pelaksanaan pelatihan. Materi yang disusun dalam modul ini memperhatikan kejelasan dan kesantunan berbahasa sehingga tujuan dari pelatihan tercapai. Materi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, kegiatan kreatif dan ilmiah. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal dalam pencapaian *hard skill* dan *soft skill* peserta pelatihan.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penyusunan modul pelatihan ini, Chancellor dan Rektor Universitas Djuanda, Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Djuanda, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Drs. Denny Hernawan, M.A, yang juga sebagai ketua tim pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan kepada semua pihak yang membantu atas tersusunnya modul ini.

Penyusun,

Agustina M. Purnomo

Daftar Isi

Pangantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
Bab I. Pendahuluan.....	1
A. Deskripsi Modul.....	1
B. Prasyarat.....	2
C. Petunjuk Penggunaan Modul.....	2
D. Tujuan Akhir	2
E. Standar Kompetensi.....	3
Bab II. Materi Pelatihan.....	5
Bab III. Pelaksanaan dan Metode Pelatihan.....	7
A. Persiapan Pelatihan.....	7
B. Metode Pelatihan.....	8
C. Pelaksanaan Pelatihan.....	9
D. Monitoring dan Evaluasi Pelatihan.....	9
Bab IV. Modul Pembelajaran.....	11
A. Pembelajaran 1.....	11
B. Pembelajaran 2.....	14
C. Pembelajaran 3.....	23
D. Pembelajaran 4.....	34
Bab V. Penutup.....	37
Daftar Pustaka.....	38
Lampiran.....	4

Daftar Tabel

Tabel 1.	Keterkaitan antara Materi Pelatihan dengan Kompetensi Capaian Pelatihan.....	5
Tabel 2.	Jadwal Penyampaian Materi Pelatihan	9
Tabel 3.	Data Penerima Program Permodalan LPMUKP di Kabupaten Sukabumi 2018-2021	18
Tabel 4.	Rekapitulasi Klaim Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Tahun 2016-2020.....	19
Tabel 5.	Rekapitulasi Klaim Asuransi Nelayan Mandiri Tahun 2018- 2021.....	20
Tabel 6.	Rekapitulasi Peserta Asuransi Nelayan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dan Mandiri	20
Tabel 7.	Klaim BPJS Tenagakerjaan Periode 2019-2021.....	21

Daftar Gambar

Gambar 1.	Permasalahan Nelayan di Indonesia.....	15
Gambar 2.	Mekanisme Program SeHAT Nelayan di Kabupaten Sukabumi.....	16
Gambar 3.	Strategi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Nelayan.....	24
Gambar 4.	Model Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan.....	26
Gambar 5.	Langkah-Langkah Sinergis dalam Memenuhi Kebutuhan Nelayan dalam Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Nelayan.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan pedoman pelaksanaan pelatihan untuk masyarakat nelayan di Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Pelaksanaan pelatihan merupakan bagian dari program Pembelajaran Kolaboratif Berorientasi pada Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021.

Pelaksanaan pelatihan mengacu pada hasil penelitian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan untuk Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim yang dilaksanakan di lokasi yang sama pada tahun 2018-2020. Hasil penelitian di tahun ketiga menemukan terdapat “*kesenjangan*” pemahaman misi antara nelayan (sebagai sasaran program) dengan lembaga yang tentang keberadaan advokasi peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan. Selain itu, penelitian juga menemukan nelayan meaasih memiliki kelemahan dalam melakukan pemetaan masalah pokok yang dihadapi nelayan. Ini menyebabkan program advokasi pemberdayaan masyarakat nelayan belum terarah secara efektif. Rekomendasi hasil penelitian tersebut adalah kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan kelembagaan dalam kerangka pemberdayaan nelayan. Oleh karenanya, pelatihan ini mengusung tema “Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dalam Kerangka Pemberdayaan Nelayan pada Masyarakat Nelayan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi”.

Pelaksanaan pelatihan adalah untuk menjawab rekomendasi hasil penelitian. Pelatihan ini dirancang untuk mendorong nelayan mampu menemukenali kondisi yang ada, kebutuhan mereka akan kelembagaan nelayan, dan langkah-langkah sinergis dalam memenuhi kebutuhan nelayan dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan dalam kerangka pemberdayaan nelayan.

B. Prasyarat

Penelitian ini dapat diikuti oleh nelayan dan pemerintah daerah mitra penelitian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan untuk Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim tahun 2018-2020. Penetapan prasyarat dilakukan agar pelaksanaan pelatihan tidak berfokus pada pengenalan awal namun langsung pada tujuan pelatihan.

C. Petunjuk Penggunaan Modul

Penyusunan modul mengacu pada analisis kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh nelayan Pelabuhanratu pada penelitian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan untuk Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim tahun 2018-2020. Oleh karena itu, penyusunan modul mengacu pada analisis masalah, perumusan tujuan, penentuan standar kompetensi, penentuan materi pelatihan, penentuan pelaksanaan dan metode pelatihan, serta monitoring dan evaluasi hasil pelatihan.

Modul ini berisi lima bab. Bab 1 berisi mengenai latar belakang, prasyarat, petunjuk penggunaan modul, tujuan pelaksanaan pelatihan dan standar kompetensi capaian pelatihan. Bab 2 berisi mengenai penentuan materi, capaian kompetensi setiap materi dan pemilihan narasumber sebagai mitra pelaksanaan pelatihan. Bab 3 berisi pelaksanaan dan metode pelatihan termasuk cara monitoring dan evaluasi pelatihan. Bab 4 berisi modul pembelajaran yang terdiri dari empat modul materi pelatihan. Bab 5 merupakan penutup. Modul ini juga dilampiri oleh alat evaluasi hasil pelatihan dalam bentuk *pre test* dan *post test*.

D. Tujuan Pelaksanaan Pelatihan

Peserta mampu menemukenali kondisi yang ada, kebutuhan mereka akan kelembagaan nelayan, dan langkah-langkah sinergis dalam memenuhi kebutuhan nelayan dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan dalam kerangka pemberdayaan nelayan.

E. Strandar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Peserta pelatihan memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mendukung peningkatan kapasitas dalam pengelolaan kelembagaan dalam kerangka pemberdayaan nelayan pada masyarakat nelayan Pelabuhan, Kabupaten Sukabumi.

Pengetahuan

- a. Peserta pelatihan mengetahui kebijakan pemberdayaan nelayan
- b. Peserta pelatihan mengetahui program pemberdayaan nelayan
- c. Peserta pelatihan mengetahui peningkatan kapasitas kelembagaan dalam kerangka pemberdayaan nelayan
- d. Peserta pelatihan mengetahui langkah-langkah sinergis dalam memenuhi kebutuhan nelayan dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan dalam kerangka pemberdayaan nelayan

Keterampilan

- a. Peserta pelatihan dapat mengenali kondisi kelembagaan yang ada saat ini.
- b. Peserta pelatihan dapat mengenali kebutuhan mereka akan kelembagaan nelayan.
- c. Peserta pelatihan dapat menyusun langkah-langkah sinergis dalam memenuhi kebutuhan nelayan dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan nelayan.

Sikap

- a. Peserta pelatihan memiliki sikap siap berperan dalam proses perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan.
- b. Peserta pelatihan memiliki sikap siap berperan dalam program pemberdayaan masyarakat nelayan.
- c. Peserta pelatihan memiliki sikap siap dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan tempat mereka saat ini.

- d. Peserta pelatihan memiliki sikap siap melakukan langkah-langkah sinergis dalam memenuhi kebutuhan nelayan dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan nelayan.

BAB II

MATERI PELATIHAN

Materi pelatihan dirancang untuk dapat mencapai kompetensi dasar dan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta pelatihan. Materi pelatihan terdiri dari empat bagian, yaitu:

1. Kebijakan pemberdayaan nelayan masyarakat nelayan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi
2. Program pemberdayaan nelayan masyarakat nelayan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan
4. Sinergi peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan dalam kerangka pemberdayaan nelayan

Keterkaitan antara materi pelatihan dengan kompetensi capaian pelatihan dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 1. Keterkaitan antara Materi Pelatihan dengan Kompetensi Capaian Pelatihan

No	Materi	Ranah Kompetensi			Target Ranah Capaian Utama
		Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	
1	Kebijakan pemberdayaan nelayan masyarakat nelayan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi	√	√	√	Pengetahuan dan sikap
2	Program pemberdayaan nelayan masyarakat nelayan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi	√	√	√	Pengetahuan dan sikap
3	Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan untuk	√	√	√	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap

	adaptasi terhadap perubahan iklim				
4	Sinergi peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan dalam kerangka pemberdayaan nelayan	√	√	√	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap

Tujuan pelatihan tidak hanya meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta pelatihan, namun juga mengadvokasi peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan. Oleh karenanya, pemateri pelatihan melibatkan pihak legislatif dan eksekutif. Pelibatan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi bertujuan untuk memfasilitasi pertemuan antara nelayan dan pihak legislatif dan eksekutif di Kabupaten Sukabumi. Pertemuan ini dapat menjadi sarana mendengarkan masalah dan kebutuhan nelayan yang didorong untuk menjadi sarana kerjasama antar pihak.

BAB III

PELAKSANAAN DAN METODE PELATIHAN

Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

A. Persiapan Pelatihan

Persiapan pelatihan meliputi beberapa kegiatan, yaitu:

- Telaah hasil penelitian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan untuk Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rekomendasi hasil pelatihan. Waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terbatas sehingga perlu dilakukan agenda prioritas yang memenuhi rekomendasi penelitian dan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat dan konteks lokasi pelatihan. Pelaksanaan pelatihan yang baik mengacu pada kesesuaian dengan konteks masyarakat (MacKeracher, et al., 2019). Telaah hasil penelitian juga merupakan langkah untuk menentukan tujuan utama, kompetensi dasar, materi pelatihan, peserta pelatihan dan mitra penyelenggara pelatihan.

- Penentuan materi pelatihan.

Penyusunan materi mengacu pada hasil penelitian tentang kebutuhan nelayan di Pelabuhanratu. Program peningkatan kapasitas nelayan hendaknya mengacu pada kebutuhan nelayan (Gbenga, Solagbero, & Oluwaseun, 2020; Adisa, Oluwaseun, & Gbenga, 2021). Materi pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan mengacu pada keterampilan untuk membangun kerjasama antar-nelayan dan antar nelayan dengan lembaga mitra (Amarasinghe & Bavinck, 2017), membangun inisiatif di tingkat komunitas nelayan (Guarda et al., 2018) dan pemberdayaan mandiri di tingkat komunitas nelayan (De la Cruz-González et al., 2018).

- Penyusunan modul pelatihan.

Penyusunan modul pelatihan dilakukan berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu.

- Teknis pemilihan peserta pelatihan.
Pemilihan peserta pelatihan dilakukan dengan menghubungi peserta secara melalui ketua kelompok nelayan untuk mendapatkan list nama nelayan dan rekomendasi nelayan yang dapat diundang. Pemberian undangan juga mengacu pada aktivitas nelayan selama pelaksanaan penelitian dan kesediaan peserta untuk hadir dalam acara pelatihan. Pelatihan diutamakan untuk nelayan aktif.
- Teknis pemilihan mitra penyelenggara pelatihan.
Penentuan mitra lembaga pelaksanaan penelitian mengacu pada tujuan pelatihan, kebutuhan materi pelatihan dan peluang kerjasama lebih lanjut. Mitra kerjasama dari kelompok nelayan telah terwakili dari peserta. Oleh karenanya, mitra pihak legislatif dan eksekutif menjadi narasumber pelatihan.
- Penentuan waktu dan tempat pelatihan.
Penentuan waktu dan tempat pelatihan dilakukan secara koordinatif dengan kelompok nelayan, DPRD Kabupaten Sukabumi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi.

B. Metode Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas pendek satu hari memerlukan kemampuan untuk mengelola pelatihan dan mengintegrasikan antara materi dan pelaksanaan pelatihan dengan perilaku, keterampilan dan pengetahuan pemateri dan peserta. Pendekatan pelatihan yang dapat dilakukan adalah mempromosikan rasa pengakuan pada diri sendiri dan kolektif, mempromosikan keterkaitan antar pihak dan mempromosikan harapan akan perubahan (Horn *et al.*, 2019). Oleh karenanya pelatihan ini selain berisi penyampaian materi juga berisi *soft skill* untuk memotivasi peserta pelatihan agar terbangun rasa pengakuan pada diri sendiri dan kolektif, keterkaitan antar pihak dan harapan akan perubahan.

Pelaksanaan pelatihan menggunakan metode ceramah atau penyampaian materi oleh narasumber, diskusi, praktik pemetaan pengetahuan dan kebutuhan nelayan serta praktik menyusun langkah-langkah sinergis dalam memenuhi kebutuhan nelayan dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan

nelayan. Penggunaan beragam cara penyampaian materi akan meningkatkan efektivitas pelatihan (Lacerenza et al., 2017).

C. Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan selama satu hari. Waktu pelatihan menyesuaikan dengan waktu luang nelayan peserta pelatihan dan mitra narasumber. Jadwal pelatihan sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Penyampaian Materi Pelatihan

Waktu	Agenda	PIC
1 jam	Registrasi dan makan	Panitia
15 menit	Pembukaan MC Pembacaan ayat suci Alquran penyerahan acara kepada fasilitator pelatihan	MC
1 jam	Materi I Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Masyarakat Nelayan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi	DPRD Kabupaten Sukabumi
1 jam	Materi II: Program Pemberdayaan Nelayan Masyarakat Nelayan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi
1 jam	Materi III: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan untuk Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim	Drs. Denny Hernawan, MA.
1,5 jam	Materi IV Sinergi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan dalam Kerangka Pemberdayaan Nelayan	Dr. Agustina M. Purnomo, M.Si.
15 menit	Penutup & Doa	MC

D. Monitoring dan Evaluasi Pelatihan

Monitoring menggunakan metode monitoring selama pelaksanaan pelatihan. Pelaksanaan monitoring adalah dengan memperhatikan tanggapan peserta pelatihan dari sisi pertanyaan, tanggapan, sikap bosan atau antusias.

Metode monitoring ini dapat digunakan untuk tetap membuat peserta fokus pada pelaksanaan pelatihan (Lacerenza et al., 2017).

Evaluasi pelatihan menggunakan metode saat pelatihan dan setelah pelatihan. Evaluasi dampak pelatihan mengenai adopsi hasil pelatihan dan penyebaran hasil pelatihan pada komunitas nelayan lain (MacKeracher, et al., 2019) atau dampak pelatihan lintas stakeholders setelah pelaksanaan pelatihan (Hanlon et al., 2018; Ferrero et al., 2019) tidak dapat dilakukan dalam kegiatan ini karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan. Metode evaluasi pelatihan menggunakan metode pada saat pelaksanaan pelatihan dan setelah pelatihan atau hanya mengukur perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap sesaat setelah pelatihan. Cara melakukan evaluasi adalah dengan memberikan *pre test* dan *post test* pelatihan untuk mengukur perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta pelatihan.

BAB IV MODUL PEMBELAJARAN

A. Pembelajaran 1

Judul Materi : **Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Masyarakat Nelayan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi**

Metode Penyampaian : **Ceramah dan diskusi**

Waktu Penyampaian : **1 jam**

Gambaran Materi

Berdasarkan hasil perolehan suara Pemilu Legislatif tahun 2019, jumlah partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sukabumi berjumlah 9 partai politik yaitu: Partai Gerindra 9 Kursi, Partai Golkar 7 Kursi, PKS 7 Kursi, PDIP 6 Kursi, PAN 6 Kursi, PKB 6 Kursi, Partai Demokrat 4 Kursi, PPP 4 Kursi, dan Partai Nasdem 1 Kursi.

Kecamatan Pelabuhanratu merupakan bagian dari Daerah Pemilihan satu. Daerah pemilihan satu memperoleh delapan kursi, yang diisi oleh: 1) Fraksi Gerindra atas nama Usep Wawan (Palabuhanratu); 2) Fraksi Golkar atas nama Denys Ali Perkasa (Warung Kiara); 3) Fraksi PKS atas nama Leni Liawati (Cisolok); 4) Fraksi PDIP atas nama Nasrudin (Cisolok); 5) Fraksi PAN atas nama Mansurudin (Palabuhanratu); 6) Fraksi PKB atas nama Eji Aziz Ismail (Palabuhanratu); 7) Fraksi Demokrat atas nama Badri Suhendi (Cikakak); dan 8) Fraksi PPP atas nama Ujang Rahmat (Palabuhanratu).

Visi pembangunan Kabupaten Sukabumi mengacu pada RPJMD 2021-2026 adalah terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang **Religius, Maju, Inovatif** menuju masyarakat sejahtera lahir batin. Visi tersebut diwujudkan dalam empat misi, yaitu: 1) membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing; 2) meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata berkelanjutan; 3) meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah; dan 4) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, professional dan akuntabel. Pembangunan sektor perikanan dan

kelautan terdapat dalam **Proyek Prioritas Bidang Ekonomi yang berbunyi “digitalisasi pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan”**.

Landasan kebijakan pembangunan di sektor perikanan dan kelautan adalah: 1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan; 2) UU No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam; 3) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan; 4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 70/2016 Tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan; 5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 39/2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Perikanan; 6) Peraturan Kepala BPN Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Permodalan; 7) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; 8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Perikanan; dan 9) Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Perikanan. Komitmen dari DPRD Kabupaten Sukabumi terhadap pembangunan di sektor perikanan dan kelautan adalah dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Perikanan.

Program pemberdayaan nelayan yang telah diupayakan oleh DPRD Kabupaten Sukabumi adalah pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan dan usaha perikanan dengan melakukan budi daya (pembenihan/pembesaran) hingga pengolahan. Selain itu juga terdapat program bantuan sarana prasarana perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran (perahu, alat tangkap, benih ikan, *cool box*, dll). Di sisi teknologi perikanan telah diusulkan dan dilaksanakan pengembangan teknologi perikanan melalui budidaya ikan laut dalam keramba jaring apung (KJA), pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi “laut nusantara”, kemudahan dalam menangkap ikan dalam genggam dengan memberikan informasi peta sebaran ikan, dan informasi bahan bakar untuk efisiensi dan peta prakiraan cuaca laut. DPRD Kabupaten Sukabumi juga mendorong program asuransi nelayan yaitu Jasindo, BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu juga mendukung program sertifikasi hak atas tanah dan akses

permodalan kepada nelayan untuk mengembangkan usaha seperti lokasi BLU, LPMUKP, PT pegadaian, PT PNM.

Kompetensi Dasar

Peserta pelatihan mampu mengetahui, memahami dan mendapat gambaran mengenai kebijakan pemberdayaan nelayan masyarakat nelayan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi untuk dapat mengambil manfaat, menganalisis peluang dan memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Peserta pelatihan mengetahui, memahami dan mendapat gambaran mengenai kebijakan pemberdayaan nelayan masyarakat nelayan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.
2. Peserta pelatihan mampu mengambil manfaat, menganalisis peluang dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemberdayaan nelayan masyarakat nelayan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.
3. Peserta pelatihan memiliki sikap siap dalam menjalin kemitraan dan melakukan advokasi terhadap DPRD Kabupaten Sukabumi.

Kegiatan Pembelajaran

1. Penyampaian materi.
2. Diskusi antara peserta pelatihan yang difasilitasi fasilitator.

Alokasi Waktu

1. Penyampaian materi 15 menit.
2. Diskusi antara peserta pelatihan yang difasilitasi fasilitator 45 menit.

B. Pembelajaran 2

Judul Materi : **Pelaksanaan Program Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Sukabumi**

Metode Penyampaian : **Ceramah dan diskusi**

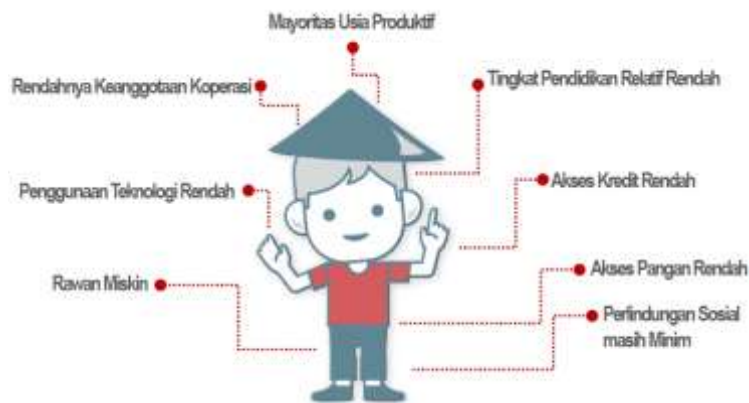
Waktu Penyampaian : **1 jam**

Gambaran Materi

Profil Nelayan dan Kelembagaan Nelayan di Kabupaten Sukabumi

Definisi nelayan menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam terbagi menjadi empat kelompok nelayan, nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik. Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (GT). Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan, sedangkan nelayan pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan Ikan.

Nelayan di Indonesia masih menghadapi beragam masalah. Nelayan masih menghadapi masalah kemiskinan (Ali, 2020; Anwar, & Wahyuni, 2019; Ilyasa, Zid, & Miarsyah, 2020; Pinem *et al.*, 2019). Selain itu, nelayan juga menghadapi masalah pendidikan, akses pangan, akses teknologi, akses kredit, dan perlindungan sosial.



Gambar 1. Permasalahan Nelayan di Indonesia

Data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi tahun 2021 menunjukkan jumlah nelayandi Kabupaten Sukabumi ada 9.697 orang. Jumlah tersebut terdiri dari kelompok nelayan yang bergerak pada usaha sektor perairan umum daratan atau yang biasa disebut PUD, 239 orang dan nelayan laut 9.458 orang. Kemiskinan masih menjadi masalah nelayan di Pelabuhanratu (Rahman, & Alhifni, 2019; Royandi, 2019; Silmi *et al.*, 2018).

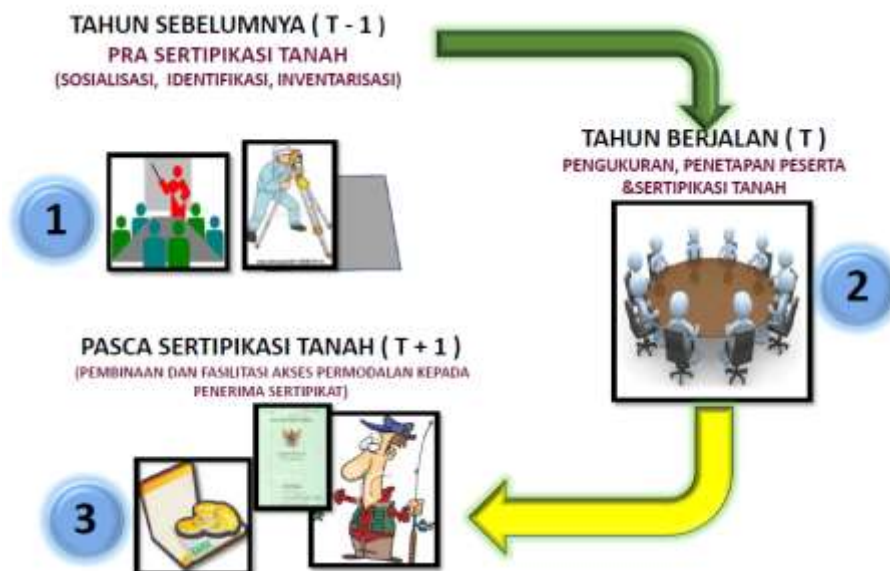
Salah satu penyebab terhambatnya penyelesaian masalah nelayan di Kabupaten Sukabumi adalah keterbatasan kelembagaan nelayan. Jumlah Koperasi Perikanan di Kabupaten Sukabumi hanya ada 25 unit dan jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas ada 13. Jumlah Kelompok Usaha Bersama ada 248 unit dan jumlah Organisasi Masyarakat hanya ada dua, yaitu Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI). Jumlah nelayan yang telah memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) masih kurang dari setengah jumlah nelayan di Kabupaten Sukabumi atau berjumlah 3.459 orang.

Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Fasilitasi Akses Permodalan LPMUKP

Sertifikasi hak atas tanah nelayan merupakan salah satu isu dalam kelembagaan nelayan di Kabupaten Sukabumi. Program yang disingkat SeHAT nelayan tersebut memiliki landasan hukum yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya

Ikan, dan Petambak Garam; 2) Nota Kesepahaman Lintas Sektor Lima Kementerian tanggal 27 November 2017 tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudi daya Ikan; 3) Perjanjian Kerjasama Eselon I Lintas Sektor 5 (Lima) Kementerian tanggal 5 April 2018 tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudi daya Ikan; 4) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; dan 5) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap No. 04/PER-DJPT/2020 Tanggal 02 Maret 2020 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan.

Program SeHAT Nelayan bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum kepemilikan atas tanah bagi nelayan, memfasilitasi penyediaan asset yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha, serta meningkatkan kepastian dan keberlangsungan usaha. Mekanisme program SeHAT Nelayan di Kabupaten Sukabumi dapat diamati pada Gambar 2.



Gambar 2. Mekanisme Program SeHAT Nelayan di Kabupaten Sukabumi

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi menetapkan kriteria subjek hak atau nelayan peserta Program SeHAT Nelayan adalah: 1. Perorangan, Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan/atau istri nelayan. 2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

sesuai dengan domisili tetap, diprioritaskan yang memiliki Kartu Nelayan (KN), apabila calon peserta belum memiliki Kartu Nelayan maka wajib mengajukan permohonan kartu Nelayan. 3. Memiliki tanah yang belum bersertifikat. 4. Menunjukkan asli alas hak (bukti kepemilikan tanah) dan menyerahkan fotokopinya. 5. Memiliki bukti pembayaran SPPT/PBB tahun berjalan yang sudah lunas. 6. Melengkapi dokumen/keterangan tertulis di atas kertas bermeterai cukup, tentang riwayat perolehan tanah dari desa/kelurahan. 7. Menunjukkan batas-batas bidang tanah yang akan disertipikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau berbatasan dengan kecamatan letak tanah pertanian yang akan disertipikatkan. 10. Sanggup membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kriteria objek hak atau tanah yang dapat disertipikatkan dalam Program SeHAT Nelayan adalah: 1. Tanah tidak dalam sengketa, tidak masuk dalam kawasan hutan. 2. Luas tanah maksimum 2.000 m² untuk tanah non pertanian atau maksimum 2 hektar untuk tanah pertanian. 3. Letak tanah berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan letak tanah pertanian yang akan disertipikatkan. 4. Untuk tanah milik adat disertai dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah setempat. 5. Bukan tanah warisan yang belum dibagi. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Seluruh nelayan yang memenuhi syarat dan memiliki objek yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti Program SeHAT Nelayan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh nelayan dalam mengikuti program SeHAT nelayan adalah: 1) mengisi formulir permohonan SeHAT; 2) melampirkan fotocopy KTP dan KK; 3) melampirkan surat kuasa apabila pengurusan dikuasakan; 4) melampirkan fotocopy SPPT PBB; 5) melampirkan bukti pelunasan BPHTB; 6) melampirkan fotocopy Hak Atas Tanah (*girik, pethuk, ketitir*, dll); 7) melampirkan surat-surat bukti peralihan berupa akta jual beli, hibah, tukar-menukar, dll; 8) melampirkan surat pernyataan pemohon di atas materai Rp. 10.000 bahwa bidang tanah tidak dalam sengketa, tidak dijaminkan dan belum pernah diterbitkan sertifikatnya.

Program SeHAT Nelayan telah berhasil mensertifikasi tanah milik nelayan sejumlah 2.450 bidang lahan dari tahun 2009 sampai tahun 2020. Sejumlah 110

bidang lahan masih dalam proses pengukuran untuk memenuhi proses sertifikasi lahan pada tahun 2021.

Program Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dari tahun 2018-2021 telah berhasil memberikan bantuan permodalan sejumlah 9,6 milyar rupiah. Data penerima program permodalan LPMUKP di Kabupaten Sukabumi dapat diamati pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Penerima Program Permodalan LPMUKP di Kabupaten Sukabumi 2018-2021

NO	NAMA KELOMPOK	JENIS USAHA	Alamat	NOMINAL PENGAJUAN	PENCAIRAN		STATUS
					DISETUJUI	TANGGAL PENCAIRAN	
1	2			4	5	6	8
1	KOPERASI GALANGAN BAHARI	Koperasi Nelayan	Kec. Palabuhanratu	200.000.000	100.000.000	21 Sep 2018	CAIR
2	KOPERASI MINAJAYA MAKMUR	Koperasi Nelayan	Kec. Surade	350.000.000	300.000.000	30 Nov 2018	CAIR
3	KOPERASI MUTIARA LAUT	Koperasi Nelayan	Kec. Ciracap	400.000.000	400.000.000	12 Mar 2019	CAIR
4	KUKP GENTENG MANDIRI	Perikanan Tangkap dan Pemasar	Kec. Ciracap	350.000.000	250.000.000	16 April 2019	CAIR
5	KUB HARAPAN KITA BINA NUSANTARA	Perikanan Tangkap dan Pemasar	Kec. Palabuhanratu	750.000.000	500.000.000	03 Mei 2019	CAIR
6	SAEFUL BAKHRI	Penangkapan Ikan dan Pemasaran	Kec. Palabuhanratu	150.000.000	150.000.000	3 Sept 2020	CAIR
7	KOPERASI SAMUDERA BAHARI UTAMA	Koperasi Nelayan	Girimukti Kec. Ciemas	7.000.000.000	7.000.000.000	12 Jan 2021	CAIR
8	ANDI FIRMAN	Perikanan Tangkap	Kec. Palabuhanratu	250.000.000	250.000.000	2021	CAIR
9	HENDRA GUNAWAN	Perikanan Tangkap dan Pemasar	Cikahuripan Cisolok	500.000.000	500.000.000	2021	CAIR
10	ANDRIANA	Perikanan Tangkap dan Pemasar	Kec. Plabuanratu	150.000.000	150.000.000	2021	CAIR
	TOTAL				9.600.000.000		

Asuransi Nelayan

Program pemebudayaan nelayan lain yang dicanangkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi adalah program asuransi nelayan. Program tersebut diberi nama program Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan (BPAN) dan Asuransi Mandiri. Pencanangan program mengacu pada beberapa dasar hukum, seperti: 1) UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. UU Nomor 45 Tahun 2009; 2) UU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; 3) Permen-KP Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; 4) Permen-KP Nomor 60/PERMEN-KP/2017 Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan

Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5) Permen-KP Nomor 31/PERMEN-KP/2021 Petunjuk teknis bantuan premi asuransi nelayan tahun anggaran 2021; 6) Perda Provinsi Jabar No. 3 Tahun 2016 Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan; 7) Peraturan Bupati Sukabumi No. 9 Tahun 2019 Peningkatan Kepersertaan dan Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan 8) Surat Edaran Bupati No. 523/8227.A/Dislutkan Tahun 2019 Himbauan Untuk Nelayan Agar Memiliki Asuransi Jiwa.

Program Asuransi Nelayan atau BPJS Tenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi individu nelayan (Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional) dalam rangka keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan. Tujuan program ini adalah untuk memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dialami individu nelayan; menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi; dan membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri.

Program Asuransi Nelayan telah berhasil memberikan bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) PT Asuransi Jasindo dari Tahun 2016-2019 untuk 7.163 orang nelayan atau 73,86% dari total jumlah nelayan. Data bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) PT Asuransi Jasindo terdapat pada tabel berikut.

**Tabel 4. Rekapitulasi Klaim Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)
Tahun 2016-2020**

NO	JENIS KLAIM	TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	JUMLAH TOTAL
1	KEMATIAN	3,840,000,000 (27 Orang)	400,000,000 (6 orang)	260,000,000 (13 orang)	40,000,000 (1 orang)	5,000,000 (1 orang)	
2	PENGGANTIAN PENGOBATAN	9,217,452 (4 orang)		13,341,100 (3 orang)			
3	CACAT TETAP	50,000,000 (1 orang)					
JUMLAH		3,899,217,452	400,000,000	273,341,100	40,000,000	5,000,000	4,617,558,552

Program Asuransi Nelayan Mandiri melalui Jasindo dari tahun 2018 sampai dengan November 2021 telah memberikan asuransi pada 641 orang nelayan atau 6,5% dari total jumlah nelayan. Data klaim asuransi nelayan mandiri dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 5. Rekapitulasi Klaim Asuransi Nelayan Mandiri Tahun 2018-2021

NO	JENIS KLAIM	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)	JUMLAH TOTAL
1	KEMATIAN	40,000,000 (2 orang)	20,000,000 (1 orang)	30,000,000 (1 orang)	15,000,000 (2 orang)	
2	PENGGANTIAN PENGOBATAN			798,150 (1 orang)		
JUMLAH TOTAL		40,000,000	20,000,000	30,798,150	15,000,000	105,798,150

Tabel 6. Rekapitulasi Peserta Asuransi Nelayan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dan Mandiri

NO	KECAMATAN	BPAN TAHUN 2016 (TAHAP 1)	BPAN TAHUN 2017 (TAHAP 2)	BPAN TAHUN 2018 (TAHAP 3)	BPAN TAHUN 2019 (TAHAP 4)	ASURANSI MANDIRI 2018	ASURANSI MANDIRI 2019	ASURANSI MANDIRI 2020	ASURANSI MANDIRI 2021
1	CISOLOK	880	674	25	91	140	98	12	2
2	CIKAKAK	0	2	0	14		1		
3	PALABUHANRATU	1090	1376	41	215	67	120	40	3
4	SIMPENAN	284	328	59	20	19	98	6	1
5	CIBEUREUM					1			
6	CIEMAS	263	381	20	85	1	3	1	7
7	CIRACAP	115	311	27	87			2	
8	SURADE	104	47	38	35		17	1	
9	JAMPANG KULON	0	0	0	1		1		
10	CIBITUNG	0	19	12	10				
11	TEGALBULED	126	382	1	0				
JUMLAH		2862	3520	223	558	228	338	62	13

Program asuransi nelayan mandiri melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah memberikan asuransi pada 755 orang nelayan atau 7,7% dari total jumlah nelayan. Data asuransi nelayan mandiri melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 7. Klaim BPJS Tenagakerjaan Periode 2019-2021

No	Nama	Pekerjaan	Nilai Santunan (Rp.)	Keterangan
1	AHMAD TRIYANTO	Nelayan KM Hoki Samudra	24.000.000	Meninggal dunia akibat Kecelakaan
2	DARKIYAN	Nelayan KM Jaya Mitra	42.000.000	Meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja
3	BUHORI	Nelayan Putra Samudra Ciracap	175.971.470	Hilang di Laut dan ditemukan sudah meninggal dunia (JKK-JKM)
4	HENDRA SUTENDAR	Wakil Keta HNSI	42.000.000	Meninggal dunia akibat kecelakaan kerja
5	IWAN	Nelayan Cisolok	42.000.000	Meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja
6	21 Anak Buah Kapal KM. Hentri GT 195	Nelayan Sukabumi	1.999.000.000	Kecelakaan dan Meninggal dunia
	J U M L A H		2.324.971.470	

Kompetensi Dasar

Peserta pelatihan mampu mengetahui, memahami dan mendapat gambaran mengenai pelaksanaan program pemberdayaan nelayan di Kabupaten Sukabumi untuk dapat mengambil manfaat, menganalisis peluang dan memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Peserta pelatihan mengetahui, memahami dan mendapat gambaran mengenai pelaksanaan program pemberdayaan nelayan di Kabupaten Sukabumi.
2. Peserta pelatihan mampu mengambil manfaat, menganalisis peluang dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan nelayan di Kabupaten Sukabumi sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan.
3. Peserta pelatihan memiliki sikap siap dalam menjalin kemitraan dan melakukan advokasi terhadap Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi.

Kegiatan Pembelajaran

1. Penyampaian materi.

2. Diskusi antara peserta pelatihan yang difasilitasi fasilitator.

Alokasi Waktu

1. Penyampaian materi 15 menit.
2. Diskusi antara peserta pelatihan yang difasilitasi fasilitator 45 menit.

C. Pembelajaran 3:

Judul Materi	: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan untuk Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim
Metode Penyampaian	: Ceramah dan diskusi
Waktu Penyampaian	: 1 jam

Gambaran Materi

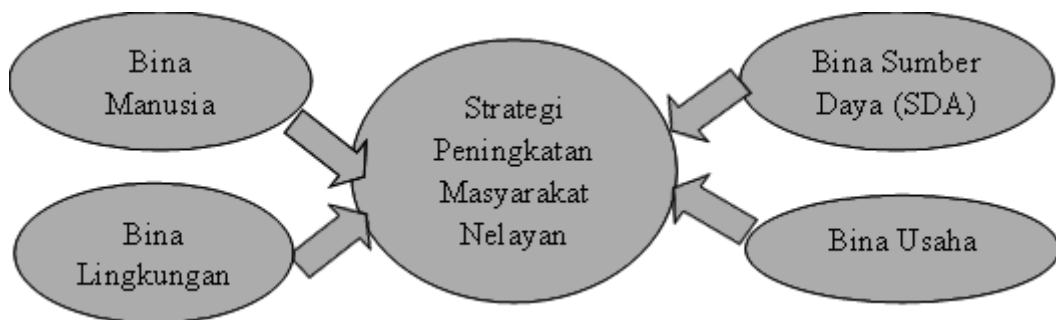
Perubahan iklim membawa dampak pada berbagai bidang kehidupan manusia, demikian halnya pada sektor kelautan dan perikanan (KLH, 2007; Nasution, 2009; Purnomo, 2010; 2011). Sektor kelautan, pesisir, dan perikanan merupakan sub sektor yang sangat banyak dipengaruhi oleh perubahan iklim. Kenaikan paras muka laut, perubahan suhu permukaan laut, perubahan kadar keasaman air laut, dan meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian ekstrim berupa badai tropis dan gelombang tinggi menjadi indikator adanya perubahan iklim di wilayah pesisir pantai.

Perubahan iklim juga berdampak pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat di daerah pesisir pantai. Bagaimanapun perubahan iklim telah menyebabkan terjadinya perubahan curah hujan, kecepatan angin, dan gelombang. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap produktivitas nelayan (sektor perikanan). Jika dibandingkan produktivitas perikanan secara global di tahun 2011 dan 2012 diperoleh data bahwa produksi perikanan global di perairan laut adalah 82,6 juta ton pada tahun 2011 dan 79,7 juta ton pada tahun 2012. Dalam dua tahun, 18 negara menangkap lebih dari rata-rata satu juta ton per tahun, terhitung lebih dari 76 persen dari hasil tangkapan laut global. Sebelas dari negara-negara ini di Asia termasuk juga Federasi Rusia, yang menangkap ikan lebih banyak di Pasifik daripada di Atlantik (FAO Fisheries and Aquaculture, 2014).

Data di atas memberi gambaran adanya perubahan produksi nelayan yang akan berpengaruh pada kualitas hidup nelayan. Nelayan membutuhkan waktu dan biaya lebih besar untuk melaut karena migrasi atau rusaknya habitat perikanan dan *fishing ground*. Kondisi tersebut menuntut nelayan untuk dapat menyesuaikan diri (beradaptasi) secara terus menerus dengan kondisi lingkungan yang baru.

Apa (?) Model Kapasitas Kelembagaan

Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat nelayan akan berdaya guna bila program dan kegiatannya disertai dengan perbaikan kondisi sumberdaya dan lingkungannya. Dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat nelayan, paling tidak mensyaratkan empat hal yakni (1) pengembangan sumberdaya manusia, (2) kesempatan berusaha, (3) perbaikan pengelolaan sumberdaya dan (4) perbaikan lingkungan yang dilakukan secara terpadu dan bersinergi, seperti disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 3. Strategi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Nelayan

Sumber : Hidayat, 2013 : 53

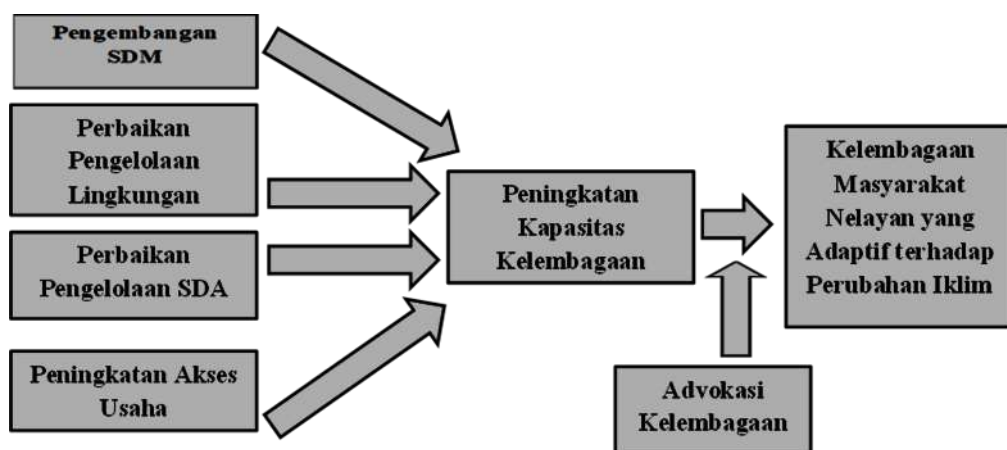
- (1) ***Bina manusia*** adalah bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan dengan mengembangkan sumberdaya manusianya. Kegiatannya mencakup (1) investasi modal manusia (*human capital*) dalam bidang pendidikan dan kesehatan, (2) peningkatan kapasitas organisasi dan kelompok baik formal maupun informal sebagai suatu cara untuk mensinergikan dan memadukan kekuatan individu, (3) memperluas dan mengintegrasikan mandat organisasi dan kelompok sehingga efisiensi bisa tercapai, (4) memperbaiki budaya kerja, kerja keras, tanggung jawab, dan hemat, dan (5) menghilangkan sifat dan mental negatif, boros, konsumtif yang memasung produktivitas dan menghambat pembangunan.
- (2) ***Bina lingkungan*** merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat nelayan melalui perbaikan lingkungan tempat tinggal dan prasarana produksi serta meningkatkan peran masyarakat dalam menata dan mengelola lingkungan hidupnya. Strategi ini mencakup: (1) meningkatkan peran masyarakat dalam

mengelola dan menata lingkungan hidup, baik tempat tinggal maupun habitat atau kawasan tempat kegiatan ekonomi produktif, (2) membangun infrastruktur terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, (3) meningkatkan perencanaan dan pembangunan secara spasial di wilayah pesisir dan daya dukung lingkungannya, (4) memperkaya sumberdaya melalui kegiatan pengayaan stok ikan dan habitat, konservasi dan rehabilitasi, mitigasi bencana, dan mengendalikan pencemaran.

- (3) **Bina sumberdaya** adalah strategi pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pelibatan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam pesisir dan laut. Strategi ini mencakup usaha (1) memberikan konsepsi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut berkelanjutan, (2) menghidupkan kembali hak ulayat dan hak masyarakat lokal, (3) mendorong partisipasi masyarakat (4) menerapkan teknologi ramah lingkungan dan pengembangan teknologi lokal (*indigenous technology*), (5) membangun kesadaran akan pentingnya nilai sumberdaya bagi generasi kini dan yang akan datang, dan (6) merehabilitasi habitat, dan memperkaya sumberdaya.
- (4) **Bina usaha** meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap permodalan yang dapat ditempuh melalui hubungan langsung antara masyarakat dengan sumber modal, hubungan secara kelompok antara masyarakat dengan sumber modal dengan atau tanpa jaminan dari pihak ketiga, hubungan antara pengusaha skala kecil secara individual atau secara kelompok dengan pengusaha skala besar atau BUMN, serta penyatuan kekuatan modal yang dimiliki masyarakat kecil secara individu.

Merujuk pada hasil survey lapangan yang dilakukan pada tahun 2019-2020 terungkap bahwa ternyata dalam upaya mewujudkan kelembagaan nelayan yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim tidak hanya bertumpu pada upaya peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan saja. Pada saat masyarakat nelayan – misalnya, paguyuban nelayan – telah mampu membuat rencana untuk mengembangkan kapasitas menangkap ikan dengan membeli perahu yang lebih besar, belum tentu akan dapat mewujudkan rencana pengembangan tersebut tanpa didukung oleh upaya advokasi kelembagaan yang konkrit untuk mewujudkan

rencana tersebut. Kegiatan lobi yang dilakukan oleh paguyuban nelayan pada pihak Lembaga keuangan, melakukan aksi Bersama untuk mengartikulasikan kepentingan nelayan pada para pembuat kebijakan (pemerintah daerah dan DPRD) untuk mengakomodasi program pemberian bantuan atau subsidi kepemilikan kapal penangkap ikan bagi nelayan serta skema pembiayaannya merupakan beberapa contoh kontribusi advokasi kelembagaan terhadap upaya agar kelembagaan masyarakat nelayan menjadi lebih adaptif dalam menghadapi dampak negative perubahan iklim yang secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan spesifik dari advokasi kebijakan yaitu "untuk memperoleh komitmen politis, dukungan kebijakan, penerimaan gagasan atau dukungan terhadap sistem untuk suatu tujuan dan program tertentu yang diperjuangkan". Adapun tujuan dan program dimaksud secara eksplisit terkait dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan yang terkena dampak perubahan iklim. Berdasarkan argumentasi tersebut maka model tentang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Nelayan perlu memasukkan komponen atau unsur tambahan sesuai dengan temuan lapangan yaitu unsur atau *komponen advokasi kelembagaan*.



Gambar 4. Model Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan

Apa yang Harus Dilakukan? Advokasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan

Perlunya advokasi kelembagaan nelayan didorong oleh adanya kebutuhan untuk mengatasi masalah riil yang didapati nelayan terkait dengan semakin jauhnya *catching area*, jumlah tangkapan ikan yang semakin sedikit, dan perubahan cuaca yang tidak menentu. Selain itu, sulitnya para nelayan mengartikulasikan kepentingannya secara terorganisasi (kolektif) menyebabkan pemenuhan kebutuhan mereka menjadi terkendala. Hal ini pada gilirannya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan nelayan.

Advokasi Kelembagaan di Pelabuhan

(1) Yang menjadi sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sukabumi dengan melakukan advokasi kelembagaan adalah agar nelayan semakin *taat aturan* yang sudah ada dalam undang-undang khususnya dalam penjagaan lingkungan dan tidak menangkap lobster dan tidak menggunakan alat tangkap berbahaya.

Upaya yang dilakukan pihak DKP untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan melakukan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, penyuluhan, pemberian subsidi asuransi jiwa, pemberian rumpon agar nelayan tangkapannya tidak jauh, memberikan efek jera dengan menangkap bagi yang melanggar aturan yang menangkap lobster atau biota laut yang dilarang.

(2) HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) juga telah melakukan advokasi pada nelayan dalam setiap permasalahan-permasalahan yang ada dan yang menjadi isu sentral di Pelabuhan. Salah satu contohnya adalah ketika musim paceklik yang tidak menentu setiap tahunnya akibat perubahan iklim, maka pihak HNSI berusaha untuk menghubungkan (*mediasi*) nelayan dengan pemerintah untuk mendiskusikan bagaimana solusi atau alternatif kebijakan yang perlu diambil agar nelayan bisa tetap bertahan hidup (*survive*) dimasa paceklik. Salah satu bentuk konkrit advokasi yang dilakukan HNSI Kabupaten Sukabumi adalah dengan membuat *koperasi* bagi nelayan agar dimasa paceklik para nelayan bisa mengambil tabungannya dan bisa meminjam walaupun terbatas. Koperasi

yang dibentuk ini juga koperasi serba usaha dan bersifat *pilot project* sehingga bisa menyalurkan hasil tangkapan sebagian para nelayan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai pihak HNSI dengan melakukan advokasi kelembagaan adalah:

- a. Nelayan *mendapatkan akses* penyelesaian permasalahan
- b. Nelayan mendapatkan klaim asuransi secara merata
- c. Hasil tangkapan ikan nelayan bisa diwadahi dengan harga yang sesuai.
- d. Tersampainya permasalahan nelayan kepada pemerintah

Untuk mencapai sasaran tersebut maka pihak HNSI melakukan berbagai upaya berupa kegiatan *audiensi* dengan pemerintah, melakukan *negosiasi* agar nelayan bisa mendapatkan klaim asuransi, melakukan *aksi* dengan mendirikan koperasi nelayan dan sebagainya.

(3) Sementara itu, advokasi yang dilakukan Kelompok Nelayan adalah dengan *membuat koperasi* yang menampung hasil tangkapan ikan. Walaupun boleh menjual sebagian pada pihak luar, tapi paling tidak harus setor ke koperasi. Namun yang menjadi kendala nelayan disini adalah nelayan masih suka menangkap lobster, padahal hal tersebut telah jelas dilarang oleh pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena lobster ini mudah dan dekat daerah tangkapnya dan hasil penjualannya memiliki keuntungan yang cukup besar, sehingga nelayan mulai berpindah untuk menangkap lobster walaupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan jangan sampai diketahui aparat. Berdasarkan hal tersebut maka Kepala Desa di kampong nelayan melakukan advokasi dengan mempertemukan kelompok nelayan dan aparat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut untuk mencari *win-win solution*.

Adapun sasaran yang ingin dicapai pihak Kelompok Nelayan dengan melakukan advokasi kelembagaan adalah:

- a. Nelayan bisa melaut dengan menangkap lobster atau membudidayakan lobster.
- b. Menyelesaikan permasalahan kasus nelayan apabila berhadapan dengan aparat.
- c. Tersampainya permasalahan nelayan kepada pemerintah.

Upaya yang dilakukan pihak Kelompok Nelayan untuk mencapai sasaran advokasi kelembagaan tersebut adalah melakukan negosiasi dengan pihak DKP Kabupaten agar nelayan bisa membudidayakan benur atau benih lobster dan *negosiasi* dengan aparat agar nelayan yang melakukan pelanggaran hanya diberikan pembinaan bukan dipenjara.

(4) Dengan merujuk pada dokumen **Rencana Kerja (Renja) DKP Kabupaten Sukabumi** Tahun Anggaran 2018 telah disebutkan berbagai bentuk advokasi dalam bentuk program peningkatan kapasitas nelayan yang dilakukan pihak DKP yaitu:

1. Pelatihan Pembuatan Rumpon Laut Dangkal.
2. Pelatihan Pengelolaan Alat Bantu Rumpon.
3. Audiensi dengan Kelompok Nelayan untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi.
4. Sosialisasi Asuransi Nelayan dan pembuatan kartu Asuransi Nelayan.
5. Kampanye Media dengan membuat spanduk pelarangan penangkapan Benur/lobster, Kampanye Media dengan Papan pelarangan dan aturan-aturan penangkapan.
6. Mobilisasi aksi ketika Hari Nelayan menjadi kesempatan Pemerintah untuk memberikan pencerdasan pada nelayan.
7. Lobby kepada Pemerintah untuk memperjuangkan klaim asuransi untuk nelayan.
8. Mediasi dialog antara nelayan dengan perusahaan PLTU dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan.

Selain itu, dalam Dokumen **Rencana Strategis DKP Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021** disebutkan khusus bagi nelayan yang beralih profesi sebagai pembudidaya ikan, pihak DKP menyusun program Peningkatan Kapasitas Pembudidaya Ikan dengan bentuk advokasi berupa kegiatan pelatihan dan pembinaan untuk 200 orang setiap tahunnya.

Dengan adanya upaya advokasi kelembagaan yang dilakukan pihak DKP maka hal tersebut berarti adanya jaminan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kepentingan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Faktor-faktor internal yang selama ini berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan advokasi, yaitu:

- a. Pendampingan yang intensif dari pemerintah dan tokoh masyarakat.
- b. Dukungan secara finansial dan sumberdaya manusia yang memadai.
- c. Pendekatan melalui Lobi dan audiensi yang dilakukan oleh berbagai pihak ternyata membuat setiap keputusan dihasilkan keputusan yang *win-win solution*.
- d. Sedangkan advokasi gagal dilakukan faktor internalnya karena advokasi, penyuluhan dan pendampingan tidak dilakukan secara intensif, dan dalam membuat program kurang melihat kondisi dan peta masyarakat nelayan yang paling baru yang paling dibutuhkan nelayan. Selain itu masyarakat nelayan sangat sulit sekali untuk berkelompok sehingga sulit untuk terorganisir, belum lagi faktor pendidikan nelayan yang masih rendah sehingga membuat masyarakat terkadang tidak faham bahasa-bahasa yang disampaikan oleh pemerintah ketika sosialisasi.

Faktor-faktor eksternal yang selama ini berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan advokasi, yaitu:

- a. Banyaknya dukungan dari luar lembaga seperti dukungan dari Pengusaha, HNSI dan Kelompok Nelayan, baik dukungan secara ide atau gagasan dan sumberdaya.
- b. Sedangkan faktor kegagalan eksternal dari advokasi adalah karena perubahan iklim yang tidak menentu, seperti ketika pembuatan rumpon, ternyata tidak cocok untuk di lautan yang memiliki ombak besar, sehingga rumpon secara otomatis rusak ketidaksi cuaca sedang buruk. Ada pihak atau oknum yang menampung ikan yang dilarang ditangkap oleh pemerintah sehingga nelayan tergoda untuk menangkap ikan yang dilarang pemerintah karena bayaran yang mahal.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam merespon keberhasilan atau kegagalan sehingga advokasi dapat dilakukan secara berkesinambungan diantaranya:

- a. Upaya yang dilakukan dalam merespon keberhasilan adalah pemerintah terus melakukan peningkatan mutu pelayan kepada nelayan dalam pemberian subsidi asuransi jiwa dan bisa menjangkau seluruh nelayan di Kab. Sukabumi.
- b. Sedangkan upaya-upaya dalam merespon kegagalan adalah dengan tidak merencanakan kembali program yang sama ditahun mendatang, seperti program rumpon yang memang mayoritas tidak cocok dengan kondisi laut yang berombak besar.

Berdasarkan deskripsi tersebut maka dapat diambil kesimpulan umum bahwa pada derajat tertentu kegiatan advokasi kelembagaan telah dilakukan walaupun hasil atau dampak yang diinginkan belum optimal sebagai akibat perbedaan karakteristik kelembagaannya. Sesuai dengan karakteristiknya, Lembaga pemerintah seringkali menggunakan bentuk sosialisasi, penyuluhan, bimbingan atau pendampingan terhadap nelayan untuk memecahkan masalah yang dihadapi nelayan terkait perubahan iklim. Namun, karena adanya keterbatasan sumberdaya yang ada (utamanya sumberdaya anggaran dan sumberdaya manusia) hasilnya belum optimal. Pada sisi lain, kelembagaan berbasis kelompok atau masyarakat (sesuai melakukan karakteristiknya) menggunakan bentuk advokasi yang lebih beragam mulai dari kampanye media, lobbying, sampai aksi nyata berbasis kebutuhan nelayan (*need-based*) seperti membentuk koperasi nelayan baik untuk kepentingan pemasaran hasil tangkapan ikan maupun akses modal untuk menangkap ikan. Selain itu, untuk mengartikulasikan kepentingan nelayan maka kelembagaan berbasis kelompok atau masyarakat juga melakukan advokasi kasus (menyangkut nelayan yang ditangkap karena melanggar aturan) maupun advokasi kebijakan (melakukan lobby agar pemerintah menyediakan program yang memfasilitasi kebutuhan nelayan).

Penyusunan Rencana Aksi Berbasis Model Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Nelayan

Salah satu luaran wajib dari penelitian ini adalah rumusan rekomendasi kebijakan terkait dengan tema pokok penelitian tahun jamak ini yaitu relevan dengan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan untuk adaptasi

terhadap perubahan iklim. Untuk itu maka rekomendasi kebijakan yang akan dirumuskan harus sesuai dengan model peningkatan kapasitas kelembagaan yang sudah menjadi luaran wajib tahun kedua. Lebih spesifik, rekomendasi kebijakan yang dirumuskan harus merujuk pada identifikasi masalah atau kendala yang ada pada masing-masing komponen dalam model atau yang dalam literatur kebijakan publik biasa disebut *problem-based policy*. Berdasarkan hal tersebut maka rekomendasi kebijakan yang akan dirumuskan merujuk pada kondisi yang ada saat ini (*existing condition*) terkait 5 (lima) aspek atau komponen model pengembangan kelembagaan nelayan, yaitu:

- a) Pengembangan SDM;
- b) Pengelolaan lingkungan;
- c) Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam;
- d) Peningkatan akses terhadap modal; dan
- e) Advokasi kelembagaan

Kompetensi Dasar

Peserta pelatihan mampu mengetahui, memahami dan mendapat gambaran mengenai langkah-langkah peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan untuk adaptasi terhadap perubahan iklim untuk dapat diterapkan dalam aktivitas keseharian peserta pelatihan.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Peserta pelatihan mengetahui, memahami dan mendapat gambaran mengenai langkah-langkah peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan untuk adaptasi terhadap perubahan iklim.
2. Peserta pelatihan mampu menyusun rencana aksi berbasis model pengembangan kapasitas kelembagaan nelayan.
3. Peserta pelatihan memiliki sikap siap dalam menerapkan rencana aksi berbasis model pengembangan kapasitas kelembagaan nelayan.

Kegiatan Pembelajaran

1. Penyampaian materi.

2. Diskusi antara peserta pelatihan yang difasilitasi fasilitator.

Alokasi Waktu

1. Penyampaian materi 15 menit.
2. Diskusi antara peserta pelatihan yang difasilitasi fasilitator 45 menit.

D. Pembelajaran 4

Judul Materi	: Sinergi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan dalam Kerangka Pemberdayaan Nelayan
Metode Penyampaian	: Praktik pemetaan pengetahuan dan kebutuhan nelayan serta menyusun langkah-langkah sinergis dalam memenuhi kebutuhan nelayan dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan nelayan
Waktu Penyampaian	: 1,5 jam

Gambaran Materi

Sesi terakhir dalam pelatihan tidak banyak menyampaikan materi namun lebih bersifat partisipatif antara peserta pelatihan dan fasilitator. Fasilitator memfasilitasi pemetaan pengetahuan dan kebutuhan nelayan serta menyusun langkah-langkah sinergis dalam memenuhi kebutuhan nelayan dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan nelayan. Landasan materi sesi ini adalah temuan penelitian terdahulu peningkatan kapasitas dalam pengelolaan kelembagaan dalam kerangka pemberdayaan nelayan memerlukan tiga langkah, yaitu: Advokasi peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan, pemetaan masalah pokok yang dihadapi nelayan, dan program advokasi pemberdayaan masyarakat nelayan yang terarah secara efektif.

Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan untuk membangun kerjasama antar-nelayan dan antar nelayan dengan lembaga mitra, membangun inisiatif di tingkat komunitas nelayan, dan pemberdayaan mandiri di tingkat komunitas nelayan. Langkah untuk mencapai tujuan ini dilakukan dengan menelaah konteks, kebutuhan dan masalah yang dihadapi komunitas nelayan. Penelaahan konteks, kebutuhan dan masalah dilakukan secara mandiri oleh nelayan dengan fasilitasi fasilitator. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis pohon masalah dan pohon tujuan. Hasil dari langkah ini adalah pemetaan pengetahuan dan kebutuhan nelayan.

Peserta pelatihan selanjutnya mengkaji langkah-langkah sinergis yang mereka anggap dapat menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka. Langkah sinergis yang peserta susun mengacu pada tiga prinsip, koordinasi dan kolaborasi (sinergi), keberlanjutan sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat. Mekanisme penemuan langkah-langkah sinergis yang mereka anggap dapat menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka mengacu pada kerangka di bawah ini.



Gambar 5. Langkah-Langkah Sinergis dalam Memenuhi Kebutuhan Nelayan dalam Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Nelayan

Kompetensi Dasar

Peserta pelatihan mampu menyusun pemetaan pengetahuan dan kebutuhan nelayan serta menyusun langkah-langkah sinergis dalam memenuhi kebutuhan nelayan dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan nelayan.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

4. Peserta pelatihan mampu menganalisis masalah dan kebutuhan mereka sendiri.
5. Peserta pelatihan mampu memetakan pengetahuan mereka yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan.

6. Peserta pelatihan mampu menyusun langkah-langkah sinergis dalam memenuhi kebutuhan nelayan dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan nelayan.

Kegiatan Pembelajaran

3. Pengantar fasilitator.
4. Diskusi antara peserta pelatihan yang difasilitasi fasilitator.
5. Presentasi peserta pelatihan

Alokasi Waktu

3. Pengantar fasilitator 15 menit
4. Diskusi antara peserta pelatihan yang difasilitasi fasilitator 45 menit.
5. Presentasi peserta pelatihan 30 menit.

BAB V

PENUTUP

Demikian modul “Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dalam Kerangka Pemberdayaan Nelayan pada Masyarakat Nelayan Pelabuharatu Kabupaten Sukabumi” ini disusun untuk dapat meningkatkan efektivitas pelatihan. Modul pelatihan ini dilengkapi dengan lampiran yang berisi *pre test* dan *post test*, alat pemetaan kondisi kelembagaan yang ada saat ini, kebutuhan akan kelembagaan nelayan, langkah-langkah sinergis dalam memenuhi kebutuhan nelayan dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan nelayan dan materi pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisa, R. S., Oluwaseun, I. J., & Gbenga, O. (2021). Determinants of Capacity Building Needs of Artisanal Fishers in Kogi State, Nigeria. *Journal of Asian Rural Studies*, 5(1), 78-89.
- Ali, A. A. (2020). Identifikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Nelayan Tradisional. *Pondasi*, 25(1), 37-49.
- Amarasinghe, O., & Bavinck, M. (2017). Furthering the implementation of the small-scale fisheries guidelines: strengthening fisheries cooperatives in Sri Lanka. In *The small-scale fisheries guidelines* (pp. 379-399). Springer, Cham.
- Anwar, Z., & Wahyuni, W. (2019). Miskin di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia dan Kemiskinan. *Sosioreligius*, 4(1).
- De la Cruz-González, F. J., Patiño-Valencia, J. L., Luna-Raya, M. C., & Cisneros-Montemayor, A. M. (2018). Self-empowerment and successful co-management in an artisanal fishing community: Santa Cruz de Miramar, Mexico. *Ocean & Coastal Management*, 154, 96-102.
- Ferrero, G., Setty, K., Rickert, B., George, S., Rinehold, A., DeFrance, J., & Bartram, J. (2019). Capacity building and training approaches for water safety plans: A comprehensive literature review. *International journal of hygiene and environmental health*, 222(4), 615-627.
- Gbenga, O., Solagbero, A. R., & Oluwaseun, I. J. (2020). Analysis of Capacity Building Needs of Artisanal Fishers in Kogi State, Nigeria. *Abuja Journal of Pure and Applied Sciences*, 1(2).
- Guarda, T., Díaz-Nafría, J. M., Augusto, M. F., & Vitor, J. A. (2018, April). Territorial intelligence in the impulse of economic development initiatives for artisanal fishing cooperatives. In *International Conference of Research Applied to Defense and Security* (pp. 105-115). Springer, Cham.
- Hanlon, C., Semrau, M., Alem, A., Abayneh, S., Abdulmalik, J., Docrat, S., & Thornicroft, G. (2018). Evaluating capacity-building for mental health system strengthening in low-and middle-income countries for service users and caregivers, service planners and researchers. *Epidemiology and psychiatric sciences*, 27(1), 3-10.
- Horn, R., O'May, F., Esliker, R., Gwaikolo, W., Woensdregt, L., Ruttenberg, L., & Ager, A. (2019). The myth of the 1-day training: the effectiveness of psychosocial support capacity-building during the Ebola outbreak in West Africa. *Global Mental Health*, 6.
- Ilyasa, F., Zid, M., & Miarsyah, M. (2020). Pengaruh Eksploitasi Sumber Daya Alam Perairan Terhadap Kemiskinan pada Masyarakat Nelayan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan*, 21(01), 43-58.
- Lacerenza, C. N., Reyes, D. L., Marlow, S. L., Joseph, D. L., & Salas, E. (2017). Leadership training design, delivery, and implementation: A meta-analysis. *Journal of Applied Psychology*, 102(12), 1686.

- MacKeracher, T., Foale, S. J., Gurney, G. G., & Purcell, S. W. (2019). Adoption and diffusion of technical capacity-building innovations by small-scale artisanal fishers in Fiji. *Ecology and Society*, 24(2).
- Pinem, E. Y., Widiono, S. W., & Irnad, I. (2019). Kemiskinan Struktural Komunitas Nelayan di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(2), 91-112.
- Rahman, A. A., & Alhifni, A. (2019). Analisis Kebutuhan Nelayan terhadap Pembiayaan LKMS. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 152-162.
- Royandi, E. (2019). Kemiskinan Nelayan dan Keberlanjutan Sumberdaya Laut di Pelabuhanratu Jawa Barat Indonesia. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 1(1), 27-36.
- Silmi, A. N. N., Wiyono, E. S., & Wisudo, S. H. (2018). Pola Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Pancing Di Cisolok. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 2(1), 79-91.

LAMPIRAN

Pre Test dan Post Test

**Pre Test Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dalam
Kerangka Pemberdayaan Nelayan pada Masyarakat Nelayan
Pelabuharatu Kabupaten Sukabumi**

Nama	:	
Asal Desa	:	
Usia	:	
Jenis kelamin	:	
Pendidikan	:	
Asal lembaga	:	
Pertanyaan		Jawaban
Apakah bapak/ibu mengetahui kebijakan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Sukabumi	() ya () tidak	
Kebijakan yang diketahui		1. Kebijakan alat tangkap 2. Kebijakan ijin penangkapan 3. Kebijakan jenis ikan yang bisa ditangkap 4. Kebijakan pemberdayaan nelayan
Apakah bapak/ibu mengetahui program pemberdayaan nelayan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi	() ya () tidak	
Program yang diketahui		1. Program pemberdayaan nelayan 2. Program pemberian modal usaha 3. Program pengolahan hasil tangkap 4. Program bantuan alat tangkap 5. Program pelatihan/sosialisasi
Apakah bapak/ibu selama ini tahu tentang kelembagaan atau kapasitas kelembagaan nelayan	() Ya () Tidak	
Menurut bapak/ibu organisasi/lembaga atau orang siapa saja yang dapat bapak ibu ajak kerjasama untuk menyelesaikan masalah yang bapak dan ibu		1. Pemerintah desa 2. Pemerintah kecamatan kecamatan 3. Kelompok nelayan 4. HNSI 5. Pemerintah daerah/DKP 6. DPRD

hadapi terkait aktivitas bapak /ibu?

Apakah bapak/ibu () ya
menganggap berguna () tidak
kerjasama antar lembaga
dalam menyelesaikan
masalah yang bapak dan ibu
hadapi?

Apakah bapak /ibu () ya
menganggap kerjasama antar () tidak
lembaga dalam
menyelesaikan masalah yang
bapak dan ibu hadapi
mungkin dilakukan?

Menurut bapak/ibu apa
langkah untuk meningkatkan
kapasitas kelembagaan
nelayan di tempat bapak/ibu
tinggal?

1. Memperkuat kemampuan diri nelayan
 2. Terlibat dalam kelompok nelayan di komunitas
 3. Mengembangkan kemampuan anggota komunitas lain
 4. Bekerjasama dengan pemerintah
 5. bekerjasama dengan DPRD
 6. Bekerjasama dengan swasta
 7. Bekerjasama dengan LSM
 8. Bekerjasama dengan media massa
 9. Bekerjasama dengan lembaga semi pemerintah
 10. Memperhatikan keberlangsungan usaha tangkap
 11. Terdapat kebijakan yang mendukung keberlanjutan usaha tangkap
-

Apakah bapak/ibu tahu tentang advokasi () Ya

Atau advokasi kelembagaan baik yang () Tidak
dilakukan pemerintah maupun diluar
Pemerintah

Apakah bapak/ibu menilai kegiatan advokasi
yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun () Ya
non-pemerintah selama ini telah memberikan () Tidak
dampak positif terhadap kesejahteraan nelayan
